



# Pedagang Nuthuk, Izin Dicabut

■ Pemkot Pastikan Harga Jual Harus Wajar

**Risiko nuthuk jelas, saya tutup nanti. Sanksinya berat, sehingga teman-teman (pedagang) diharapkan dapat saling mengingatkan.**

Ekwanto

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta memastikan tidak memberikan toleransi terhadap perilaku *nuthuk* atau menerapkan harga di luar batas kewajaran, untuk para pedagang di kawasan Malioboro. Sanksi tegas berupa penutupan pun bakal diganjar jika masih ada pelaku usaha yang nekat melancarkan aksi tersebut.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Ekwanto menyampaikan, perilaku *nuthuk* harus diberantas, karena sangat mencoreng citra pariwisata Yogyakarta. Dalam waktu, dekat jajarannya pun sudah menjadwalkan giat

● ke halaman 11



## Pedagang Nuthuk

• Sambungan Hal 1

Inspeksi mendadak (sidak), menasar sejumlah pedagang di sana.

"Ini untuk teman-teman lesihan dan pedagang. Nanti, H-3 Lebaran akan kita adakan sidak, untuk monitoring terkait harga-harga. Harus ada kepastian, di setiap meja wajib ada menu disertai harga," jelasnya, Minggu (16/4).

Menurut Ekwanto, langkah tersebut ditempuh untuk memberi kenyamanan kepada wisatawan yang bakal singgah di Malloboro selama libur Lebaran mendatang. Dengan begitu, pelancong pun tidak akan ragu saat ingin berbelanja ataupun menyantap kuliner khas sambil menikmati atmosfer kawasan Malloboro.

"Jangan sampai pengunjung yang datang mau jajan, mau belanja sembari menikmati Malloboro itu malah merasa takut. Tidak perlu takut, ya, semua akan kami verifikasi harganya dan kami pastikan tidak ada yang berani nuthuk," ucapnya.

Bukan tanpa alasan, sejak jauh-jauh hari pihaknya sudah mewanti-wanti seluruh pedagang dan pelaku usaha, bahwa Pemkot Yogyakarta tidak akan memberikan toleransi pada siapapun yang nekat nuthuk. Bahkan, lanjutnya, risiko yang membayangi terlalu berat jika perilaku aji mumpung masih saja mereka lakukan.

"Risiko nuthuk jelas, saya tutup nanti. Sanksinya berat, sehingga teman-teman (pedagang) diharapkan dapat saling mengingatkan satu sama lain, agar Malloboro tetap menjadi destinasi yang nyaman bagi semua," cetusnya.

Lebih lanjut, wisatawan atau masyarakat yang menjadi korban nuthuk selama libur Lebaran, mendatang,

bisa segera melaporkan lewat posko-posko yang sudah disiapkan, maupun petugas Jogomaton. Ekwanto memastikan, personel Jogomaton disiapkan lebih masif untuk menghadapi potensi lonjakan turis.

"Kami siapkan teman-teman Jogomaton selama 24 jam penuh, dengan masing-masing 65 personel setiap satu shift. Mereka tidak hanya disiagakan di Malloboro saja, tapi dari Tugu sampai Keraton," jelasnya. "Harapan kami tetap kondusif, dari segi keamanan, dan tidak ada insiden nuthuk. Koneksi pasca-(pandemi) Covid-19 sudah ada kelonggaran, pasti keramaian luar biasa. Semoga itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta," imbuh Ekwanto.

### Jaga citra

Polresta Yogyakarta mewanti-wanti juru parkir (jukir) maupun pedagang, supaya ikut serta menjaga kondusivitas selama libur Lebaran mendatang. Yakni, dengan tidak sembarangan menetapkan harga di luar batas kewajaran atau nuthuk, terhadap para pemudik dan wisatawan yang tengah singgah.

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Saiful Anwar berujar, bagaimanapun potensi nuthuk tetap jadi sorotannya, karena hampir selalu terjadi tiap libur panjang hingga viral di media sosial. Menurutnya, hal tersebut tentu jadi preseden buruk sekaligus mencoreng nama baik Yogyakarta sebagai daerah tujuan pariwisata. "Jangan sampai melebihi tarif. Untuk parkir, sesuai aturan, batas maksimalnya, kan, lima kali. Harapannya petugas parkir betul-betul mematuhi. Kami imbau agar dipasang banner, cantumkan harganya," urainya.

### Perihal parkir

Selaras ketentuan, Tempat Khusus Parkir (TKP) yang dikelola swasta bisa mene-

rapkan tarif progresif, tetapi dengan kenaikan maksimal lima kali dari tarif dasar. Sehingga, dalam batas waktu tertentu, tarif parkir bisa menyentuh Rp10 ribu, dengan catatan penerapannya diinformasikan lebih dulu pada pengguna jasa.

"Bagi yang mungkin dikenakan tarif parkir di luar batas, silakan melaporkan. Akan kami tindak tegas, karena merusak nama baik Kota Yogyakarta," katanya. "Begitu juga (pedagang) kuliner, ditetapkan tarifnya, jangan sampai terjadi insiden nuthuk, karena yang rugi kita sendiri, warga Kota Yogyakarta," imbuh kapolresta.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengungkapkan, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Dalam Pasal 29 Ayat 2 soal pungutan jasa parkir dijelaskan bahwa tarif swasta diatur paling tinggi 5 kali tarif yang ditetapkan pada tempat khusus parkir milik pemerintah. "Tarif dasar motor Rp2 ribu, itu maksimal ketika momen seperti ini hanya bisa 5 kali dari 2rb, untuk yang swasta. Kalau (TKP yang dikelola) pemerintah tidak naik," ucapnya, Minggu (16/4).

Namun, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif perparkiran terbagi dalam tiga kawasan. Yakni, sepeda motor roda dua di Kawasan I yang mencakup area seputar Malloboro dipatok Rp2 ribu untuk dua jam pertama dan Rp1.500 untuk jam-jam berikutnya, lalu untuk Kawasan II dan III ditetapkan Rp1.000, tanpa disertai tarif progresif.

Sedangkan untuk kenda-

raan roda empat seperti jip, sedan, station wagon, atau bermotor roda tiga, sesuai aturan tersebut dikenakan Rp5 ribu pada dua jam pertama dan Rp2.500 untuk jam-jam berikutnya di Kawasan I. Sementara untuk Kawasan II dan III, tarifnya Rp2 ribu, tanpa disertai patokan durasi waktu, layaknya aturan retribusi pada kendaraan roda dua.

Melalui kebijakan tersebut, Sumadi berharap, para juru parkir yang beroperasi pada libur Lebaran mendatang tidak mematok tarif sesuka hatinya. Dengan tegas ia mengatakan, fenomena parkir nuthuk yang berulang kali terjadi beberapa waktu lalu, hingga viral di ragam lini media sosial tidak terulang, karena berpotensi merusak citra pariwisata Kota Pelajar.

"Kami mengimbau untuk parkir itu jangan sampai nuthuk, apalagi kalau sampai di-upload di media yang akan merusak citra kita. Tadi kami sudah sampaikan kepada teman-teman di wilayah untuk mengantisipasi jangan sampai kejadian itu," katanya. "Termasuk juga dengan Dinas Perhubungan, apabila terjadi kalau sudah dipasang banner (petunjuk tarif) kemudian nuthuk, kami tidak segan untuk memberi sanksi tegas," tambah Sumadi.

Sumadi, sebelumnya telah menginstruksikan seluruh instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan agar insiden nuthuk tak terjadi di libur Lebaran. Sanksi tegas pun tidak perlu ragu untuk dijatuhkan bagi mereka yang tetap nekat mengerek benderol di luar batas kewajaran. "Retribusi parkir, pedagang kuliner, semua wajib memajang tarif. Jangan sampai ada kejadian nuthuk. Jika tidak sesuai, laporkan saja, pasti langsung kami tindak tegas itu," ujarnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Amat Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005